



Menelaah Permasalahan Keamanan Non-Tradisional (*Human Trafficking*) di Thailand: Analisis Konstruktivisme

Nur Ainun Musdalifah

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin,
Indonesia.

Alamat Kampus: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea

*Korespondensi Penulis: nurainunmusdalifah643@gmail.com

Abstract. *Human Trafficking is a non-traditional security issue that is of particular concern for the Southeast Asian region. Thailand is the country that is most highlighted for this case, especially in sexual exploitation in the form of prostitution. Prostitution in Thailand is even included in the category of tourism for foreign tourists. This prostitution tourism contributes 60% of the country's income for the tourism sector, exceeding half of tourism income. Prostitution tourism is certainly very closely related to human trafficking, as can be seen in commercial sex workers (CSWs) who are mostly minors and women. The deep-rooted culture is a trigger for the rise of CSWs who mostly come from rural communities. The culture that comes from Buddhism as the largest teaching in Thailand is "returning favors", namely that children are obliged to help the family economy. This study uses a descriptive qualitative research method with a library research data collection technique to see the problem of human trafficking in Thailand with a constructivist approach. The results of the study will discuss human trafficking in Thailand, local culture that has an impact on the problem of human trafficking, and international responses to this problem. With this understanding, it is hoped that we will be able to see the problem of human trafficking from a social and normative perspective, which has so far only focused on international cooperation and law enforcement.*

Keywords: *Human Trafficking, Prostitution Tourism, Local Culture, International Response*

Abstrak. *Human Trafficking* menjadi isu keamanan non tradisional yang menjadi perhatian khususnya bagi kawasan Asia Tenggara. Thailand menjadi negara yang paling disoroti untuk kasus ini terutama pada eksploitasi seksual berupa prostitusi atau pelacuran. Prostitusi di Thailand bahkan masuk dalam kategori wisata bagi wisatawan mancanegara. Wisata prostitusi ini menyumbang 60% pendapatan negara bagi sektor pariwisata melebihi dari setengah pendapatan pariwisata. Wisata prostitusi tentu sangat erat kaitannya dengan *human trafficking*, dapat dilihat pada para pekerja seks komersial (PSK) yang rata-rata anak dibawah umur dan perempuan. Budaya yang telah mengakar menjadi pemicu dari maraknya para PSK yang rata-rata berasal dari masyarakat pedesaan. Budaya yang berasal dari Buddhisme sebagai ajaran terbesar di Thailand yakni "balas budi" yaitu anak wajib membantu perekonomian keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) untuk melihat permasalahan *human trafficking* di Thailand dengan pendekatan konstruktivisme. Hasil penelitian akan membahas tentang *human trafficking* di Thailand, budaya lokal yang berdampak pada permasalahan *human trafficking*, serta respon internasional terhadap permasalahan ini. Dengan pemahaman ini, diharapkan mampu melihat permasalahan *human trafficking* dari segi sosial dan norma yang selama ini hanya berfokus pada kerjasama internasional dan penegakkan hukum.

Kata Kunci: Human Trafficking, Wisata Prostitusi, Budaya Lokal, Respon Internasional

1. LATAR BELAKANG

Human trafficking menjadi isu keamanan non tradisional yang menyita perhatian dunia internasional walaupun dengan kondisi global sekarang terjadi banyak konflik baik di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan. Perbudakan yang terjadi ribuan tahun lalu menjadi cikal bakal dari istilah *human trafficking* atau perdagangan manusia. *Human trafficking* masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia dan kondisi ini sudah disepakati oleh masyarakat internasional. Faktor pemicu munculnya *human trafficking* berbeda-beda antara negara dengan negara lainnya serta faktor pemicu tidak hanya sebatas pada satu faktor saja tetapi juga beragam faktor. Faktor ekonomi yang disebabkan oleh ketersediaan lapangan kerja, gaya hidup yang tidak selaras dengan penghasilan, pola pikir dan pola hidup masyarakat, serta sosial budaya menjadi beragam faktor pemicu terjadinya *human trafficking* (Syamsudin, 2020). Namun, dari beragam faktor tersebut pemicu dasarnya yakni masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat menjadi faktor utama dari pemicu *human trafficking*.

Faktor utama pemicu tersebut menjadikan *human trafficking* banyak terjadi di negara-negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang. Salah satu kawasan yang anggotanya rata-rata adalah negara berkembang dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi yakni kawasan Asia Tenggara. Kasus *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara terbagi atas dua yakni eksploitasi seksual dan juga eksploitasi non seksual. Bagi kawasan Asia Tenggara sendiri, hampir semua negara menjadi tempat praktik *human trafficking* sehingga Asia Tenggara menjadi kawasan penyumbang korban kasus *human trafficking* terbesar di dunia. Negara yang paling disoroti yakni Thailand yang terkenal dengan pekerja seksual dan dunia malamnya, bahkan sudah dikenal di tingkat global. Menurut data dari *United Nation Office on Drugs and Crime* antara tahun 2016-2018 menyatakan bahwa hampir 70% dari korban *human trafficking* dengan eksploitasi secara seksual di Asia Tenggara yakni kategori perempuan dibawah umur dengan penyebaran mayoritas di Thailand dan beberapa negara lainnya di Asia (Darmayanti & dkk, 2022). Para aktor atau pelaku yang berperan bukan hanya sebatas dalam negeri saja tetapi juga praktik ini sudah pada tahap lintas negara dengan strategi yang terorganisir serta melibatkan proses suap menyuap dengan elit terkait.

Thailand dikenal dengan julukan “Negeri Gajah Putih” dengan sektor pariwisata yang menarik perhatian dunia sehingga mendatangkan wisatawan asing ratusan ribu setiap tahunnya. Dibalik julukan tersebut, Thailand mendapat sorotan internasional sebagai pusat dari prostitusi terbanyak di dunia. Tempat yang terkenal seperti Bangkok dan Pattaya sangat terbuka bagi wisatawan dan turis untuk menikmati jasa-jasa para Pekerja Seks Komersial yang menawarkan

diri. Para PSK ini bukan hanya pada tingkat lokal tetapi direkrut dari negara-negara tetangga yang juga termasuk dalam kategori negara berkembang seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja. Thailand menjelma menjadi pusat bagi fenomena *human trafficking* dengan eksploitasi seksual berupa prostitusi atau pelacuran (Ananta, 2023). Latar belakang pemenuhan ekonomi yang tidak tercukupi menjadi alasan bagi para pekerja menjadi PSK dengan memanfaatkan “jalan singkat” untuk menghasilkan uang. Namun, ternyata ada faktor lain yang menyebabkan fenomena ini semakin berkembang dan tumbuh di Thailand.

Masyarakat Thailand sendiri menganggap bahwa menjadi PSK adalah hal yang biasa dan masuk dalam kategori pekerjaan sampingan bahkan pada tahap pekerjaan utama. Pemerintah Thailand sendiri sejak tahun 1960 telah mengakui secara *de jure* bahwa prostitusi adalah kegiatan illegal (Nuraeny, 2016). Budaya lokal Thailand yang mengakar pada masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang sangat jauh dari kata Sejahtera yakni “balas budi”. Dalam hal ini yakni balas budi dalam bentuk dukungan ekonomi. Kondisi ini memberikan tekanan budaya bagi masyarakat pedesaan bahkan sejak mereka anak-anak dan ini banyak terjadi pada perempuan. Tekanan ini mengakibatkan mereka mencari kerja di kota-kota besar yang menjadi pusat praktek prostitusi. Para perekrut menjadikan para perempuan ini sebagai target untuk dijadikan sebagai PSK walaupun diantara mereka masih banyak yang tergolong sebagai anak-anak. Eksploitasi seksual yang berkembang menjadi budaya permisif di Thailand mengakibatkan objek yang menjadi pelaku utama merajalela dan dianggap sebagai lahan bisnis oleh para mucikari. Kondisi ini menarik para warga negara asing khususnya dikawasan Asia Tenggara yang masih tergolong negara berkembang untuk mencari celah dan masuk bergabung dalam dunia prostitusi. Dengan banyaknya warga negara asing yang masuk maka berakibat pada peningkatan kasus *human trafficking* di Thailand dan Asia Tenggara (Abdussalam, 2006).

2. KAJIAN TEORITIS

Setelah perang dingin antara Amerika Serikat-Uni Soviet, para pakar hubungan internasional lebih fokus mengenai isu-isu *high politics*, seperti permasalahan komunisme-liberalisme, isu pengembangan nuklir, masalah keamanan nasional, dan isu lainnya. Isu tentang keadilan gender, budaya, dan kelompok etnis menjadi isu yang sangat jarang untuk dibahas dikalangan para pakar hubungan internasional. Hal tersebut mendorong para pakar hubungan internasional seperti Nicholus Onuf, Alexander Wendt, Emanuel Adler, Friedrich Kratochwil, John Ruggie, dan Peter Katzenstein untuk membahas isu-isu sosial dan mengembangkan teori yang bernama Konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah perspektif sosiologis dan

antropologis tentang politik dunia yang berfokus pada analisis mengenai norma, peran identitas dalam pembentukan kepentingan dan tindakan, serta hubungan timbal balik antara *agents* dan *structures* (Bakry, 2017). Dalam bahasa lain, konstruktivisme tidak dapat dipisahkan dengan budaya dan norma yang mengakar dari masyarakat itu sendiri.

Fokus dari perspektif konstruktivisme yaitu menggunakan pendekatan empiris dalam melihat ide intersubjektif untuk meneliti hubungan internasional. Elemen ideasional yang menjadi fokus utama kaum konstruktivisme terletak pada keyakinan intersubjektif yang tersebar di masyarakat. Ide-ide tersebut dapat berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda, seperti, organisasi internasional, pembuat kebijakan, kelompok sosial, atau masyarakat. Ide-ide adalah konstruk mental yang dipegang oleh para individu. Terdapat banyak ide yang berbeda, Nina Tannenwald (2005) mengklasifikasikannya ke dalam empat kategori utama yaitu: ideologi (sistem kepercayaan bersama), keyakinan normatif, keyakinan sebab-akibat, dan resep kebijakan. Berikut definisi mengenai empat ide tersebut (1) Ideologi merupakan rangkaian dogma yang tercermin dalam kebutuhan sosial serta aspirasi kelompok, budaya, kelas, dan negara; (2) Keyakinan Normatif yaitu keyakinan mengenai tentang benar dan salah, keyakinan tersebut terdiri dari nilai-nilai serta sikap yang menunjukkan kriteria dalam hal membedakan benar dan salah atau membedakannya dari ketidakadilan dan standar perilaku; (3) Keyakinan kausal merupakan keyakinan mengenai hubungan sebab-akibat atau hubungan sarana-akhir; dan (4) Resep kebijakan adalah ide program spesifik yang membantu pembuat kebijakan dengan menjelaskan mengenai bagaimana untuk menyelesaikan masalah kebijakan tertentu.

Ahli Konstruktivisme seperti Peter Katzenstein dan Alexander Wendt menekankan pentingnya lingkungan internasional dalam membentuk identitas negara. Dalam hal ini, bagaimana norma internasional memiliki efek yang tidak sama di negara yang berbeda dan kemudian berspekulasi mengenai faktor domestik yang bertanggung jawab untuk hal ini (Jackson & Serensen, 2013). Lebih lanjut, Alexander Wendt mengungkapkan sebuah kalimat singkat "*Identities are the basic of interest*" yang memiliki arti bahwa perilaku yang tercermin dari suatu negara tidak dapat dipisahkan dari identitas negara tersebut. Konstruktivisme percaya bahwa variabel kepentingan bukan hanya berasal dari hal yang sifatnya material tetapi juga bersifat sosial yang terkonstruksi dari sejarah, ide, norma atau kepercayaan. Pandangan ini menyatakan bahwa agen-agen telah mengkonstruksi secara sosial mengenai realitas politik internasional melalui pemahaman bersama atau *intersubjective*. Selain itu konstruktivisme melihat bahwa norma yang terbentuk dan mengakar dalam masyarakat dapat menciptakan legitimasi sosial walaupun fenomena yang terkait dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang.

Perilaku yang mengakar tersebut akan membentuk persepsi yang baik dikalangan masyarakat lokal dengan memanfaatkan istilah dan keadaan yang vital bagi masyarakat umum seperti ekonomi dan budaya. (Bakry, 2017). Oleh karena itu, dalam menggunakan pendekatan konstruktivisme, melihat dari budaya lampau masyarakat dan bagaimana itu membentuk kebiasaan dan norma yang berlaku adalah hal yang pokok dalam melakukan analisis konstruktivisme.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Metode penelitian kualitatif merupakan teknik penelitian yang menggunakan narasi atau deskriptif dalam menjelaskan dan menganalisis berbagai gejala, fenomena dan situasi sosial. Metode ini membantu penulis dalam melihat budaya masyarakat pedesaan Thailand yang berimplikasi pada *human trafficking* dalam aspek eksploitasi seksual perempuan dan anak berupa prostitusi (PSK) serta respon dunia internasional mengenai *human trafficking* di Thailand dan kaitannya dengan budaya tersebut. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah (jurnal), *website* yang terpercaya dan publikasi elektronik lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Thailand dikenal dengan sektor pariwisata dengan berbagai sektor unggulan seperti wisata alam, tempat ibadah, bangunan bersejarah dan kuliner yang terkenal unik. Namun yang paling terkenal dan berkembang setiap tahunnya yakni wisata prostitusi. Wisata prostitusi ini sangat berperan dalam perekonomian bagi negara Thailand sendiri. Menurut data dari gic (2014) yang menyatakan bahwa hampir 60% pendapatan negara itu berasal dari wisata prostitusi yang kemudian berpengaruh terhadap sektor pariwisata Thailand. Data yang lain menunjukkan bahwa setiap tahunnya sekitar 10 juta wisatawan mengunjungi Thailand dimana diantaranya 60% wisatawan laki-laki. Dari 60% wisatawan laki-laki 70% datang untuk menikmati wisata prostitusi yang marak di kota-kota Thailand. Hal ini sama angkanya dengan lebih dari 4 juta wisatawan laki-laki untuk setiap tahunnya. Daerah Pattaya menjadi daerah yang paling diminati bagi wisatawan mancanegara. Berdasarkan laporan dari *United Nations Programme On HIV and AIDS (UNAIDS)* terdapat sebanyak 27.000 pekerja seks komersial (PSK) di tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak 147.000 PSK, lebih dari 5 kali lipat dalam kurun waktu dua tahun (Anggraini, 2021). Kondisi ini tentu sangat menyumbang bagi sektor keuangan yang sangat besar bagi Thailand sehingga menjadi polemik dalam memberantas praktik prostitusi dan *human trafficking* yang terjadi di Thailand.

Ketergantungan ekonomi pada wisata prostitusi di Thailand yang sudah berlangsung mengakibatkan masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hal yang normal. Masyarakat Thailand bahkan dengan terbuka menjadikan daerah-daerah sebagai tempat mengembangkan wisata-wisata seks. Daerah tersebut juga secara terang-terangan menawarkan para PSK baik kategori anak-anak, perempuan muda, perempuan dewasa, sampai waria seperti pada daerah Danok, Thailand Selatan, Soi Nana (Nana Plaza) Patpong dan masih banyak daerah lainnya (Nurul & dkk, 2023). Sisi gelap Thailand ini menjadi normal dimulai dari faktor ekonomi yang kemudian di dukung kuat oleh budaya “balas budi”. Budaya ini mengakar dari ajaran Buddhisme sebagai ajaran terbesar di Thailand. Budaya ini seringkali dikaitkan dengan kewajiban anak untuk membantu orang tua dalam memperbaiki ekonomi keluarga mengakibatkan mereka mencari kehidupan yang lebih layak di kota-kota. Dengan budaya yang sudah mengakar ini ditambah dengan pendidikan yang masih rendah terutama dikalangan perempuan dimanfaatkan oleh para perekrut untuk menjadikan mereka PSK yang bekerja di wisata prostitusi. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk bakti anak pada orang tuanya sehingga pelanggaran berupa *human trafficking* dikaburkan dengan pandangan tersebut. Dengan kata lain, sebagai bentuk tanggung jawab sosial anal terhadap keluarganya.

Budaya lain yang mendukung terjadinya serta berkembangnya *human trafficking* di Thailand yakni sikap *Kreng Jai*. Sikap *Kreng Jai* dimaknai bersikap tidak enak untuk menolak atau menyusahkan orang lain. Kaitannya yakni para pekerja seks yang merasa hal ini adalah pelanggaran dan eksploitasi sangat sulit untuk bersuara atau melaporkan kondisi yang dialami. Para korban tidak ingin menciptakan konflik yang lebih luas dan akan berdampak kepada keluarganya. Selain itu, Thailand juga dikenal dengan negara yang memiliki struktur sosial dengan tingkatan-tingkatan yang sangat jelas perbedaannya. Kondisi ini juga mendukung sikap *Kreng Jai*, dimana PSK yang rata-rata adalah masyarakat pedesaan yang menderita kemiskinan dihadapkan kepada para perekrut dan pelaku yang memiliki kekuasaan dan status ekonomi yang lebih tinggi. Untuk menghadapi kondisi ini sangat berat bagi PSK terlebih lagi latar belakang mereka memilih “pekerjaan” ini untuk memenuhi kewajiban dan membantu kesusahan keluarga.

Kota-kota Besar di Thailand dengan wisata prostitusi yang sangat berkembang telah melahirkan budaya permisif bagi sektor pariwisata itu sendiri. Hukum di Thailand telah menyatakan bahwa prostitusi adalah hal yang illegal dan melanggar hukum. Status ini mengakibatkan stigma sosial yang rendah untuk para PSK, namun ternyata dalam kondisi yang nyata masyarakat memberikan toleransi bahkan sampai pada tahap dikaburkan sebagai bentuk eksploitasi atau pelanggaran. Pihak yang terkait sangat berperan besar untuk budaya permisif ini dan hampir semua elemen termasuk dalam pihak tersebut. Budaya permisif semakin

mempersulit untuk mengidentifikasi permasalahan *human trafficking* karena sudah menjadi hal normal bagi kehidupan masyarakat Thailand bahkan termasuk kedalam kategori “pekerjaan”.

Wisata prostitusi di Thailand yang semakin berkembang dan nyaris dianggap sesuatu yang bukan termasuk tindak pidana serta menyumbang pendapatan bagi negara yang sangat fantastis menimbulkan respon bagi negara-negara kawasan. Kawasan Asia Tenggara yang hampir semua anggotanya adalah negara berkembang melihat ini sebagai peluang bisnis yang menguntungkan terlebih celah yang dapat dimanfaatkan sangat banyak. Fenomena ini kemudian membuka para perekrut untuk menjaring bukan hanya sebatas dalam negeri tetapi juga luar negeri. Myanmar, Malaysia, Kamboja, Laos dan Indonesia menjadi target pasar bagi para perekrut yang mengakibatkan permasalahan *human trafficking* dalam skala internasional. Para perekrut pastinya tidak merekrut mereka sebagai PSK namun dengan dalih sebagai pekerja hotel, restoran, penjual streetfood dan masih banyak lainnya. Setelah sampai di Thailand, mereka kemudian dipaksa sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan melayani para turis mancanegara. Untuk itu dalam kondisi ini, Setiap negara harus hadir bagi perlindungan dan memastikan hukum yang ketat bagi perekrutan Tenaga Kerja ke luar negeri khususnya Thailand.

Perekrutan PSK yang sudah berubah menjadi skala internasional tentu menimbulkan respon bagi dunia internasional. Laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2022 menyatakan bahwa Thailand telah masuk dalam tingkat dua dalam hal *human trafficking* yang berarti bahwa Thailand telah gagal untuk memberantas *human trafficking* yang terjadi di negaranya, walaupun berbagai upaya telah dilakukan. Thailand juga dinilai tidak konsisten dan tidak efektif dalam memberantas segala praktik-praktik prostitusi di Thailand. Aparat penegak hukum dalam melakukan operasi terkesan menutup mata untuk segala hal yang terjadi disamping adanya suap menyuap, budaya permisif juga sangat berpengaruh. Pada bulan Maret tahun 2023, Thailand bahkan telah merancang undang-undang untuk melegalkan pekerja seks diatas 20 tahun dapat secara sukarela memasuki industri seks walaupun belum disahkan secara resmi. Anggota Parlemen Thailand berpendapat bahwa undang-undang ini dapat memberikan perlindungan untuk para perempuan dari eksploitasi seksual serta untuk mendukung anti perdagangan manusia. Tentu hal ini sangat tidak selaras dengan pandangan dunia internasional yang berorientasi pada Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Segala bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia adalah hal yang harus diusut tuntas bukan malah dikaburkan dengan dalih budaya dan ekonomi. Dengan kondisi ini, dapat dilihat bahwa kasus yang menjadi isu permasalahan internasional dan dianggap menyimpang tetapi bagi suatu negara itu adalah hal yang normal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Thailand dengan potensi pariwisata dalam berbagai sektor telah menyumbang pendapatan yang sangat besar bagi negara. Pariwisata Thailand sangat terkenal di tingkat Mancanegara terbukti setiap tahunnya terdapat hampir 10 juta kunjungan wisatawan. Namun dibalik semua itu terdapat sisi gelap dari sektor pariwisata Thailand yakni wisata prostitusi atau pelacuran. Wisata ini menyumbang hampir 60% bagi pendapatan negara dan perekonomian Thailand sangat tergantung dengan industri seks ini. Praktik wisata prostitusi sarat akan permasalahan *human trafficking* mengingat para PSK itu adalah anak-anak dan perempuan muda. Para PSK ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi yang sangat kurang atau masuk dalam kategori miskin.

Selain itu, faktor berkembang lainnya yang sangat berpengaruh yakni budaya yang telah mengakar akibat ekonomi dan pendidikan rendah yakni budaya “balas budi”, yang artinya anak-anak harus membantu keluarga dari segi ekonomi, sehingga mereka memilih jalan pintas dengan menjadi PSK untuk menghasilkan uang. Budaya lainnya yakni hierarki sosial yang masih sangat diterapkan di Thailand serta sikap *Kreng Jai*. Sikap *Kreng Jai* yakni sikap yang enggan untuk menolak atau menyulitkan orang lain, sikap ini kemudian melahirkan budaya permisif terhadap *human trafficking* di Thailand.

Dunia internasional tentu merespon permasalahan *human trafficking* di Thailand dengan mendesak Thailand agar menuntaskan permasalahan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan Thailand tetapi ternyata hanya sebatas upaya saja. Praktik yang nyata adalah aparat terkait justru menutup mata dengan dalih budaya permisif untuk setiap pelanggaran yang terjadi. Bahkan Thailand telah merumuskan undang-undang untuk melegalkan para pekerja seks komersial diatas umur 20 tahun. Bagi dunia internasional, Thailand dianggap mencoba untuk mengaburkan atau menormalisasikan pelanggaran ini dan berimplikasi pada pelanggaran HAM. Namun bagi masyarakat Thailand sendiri ini adalah sesuatu yang biasa dan mereka secara terbuka bahkan menerima para wisatawan asing untuk menikmati wisata prostitusi di Thailand. Masyarakat bahkan menganggap pekerja seks komersia ini sebagai “pekerjaan sampingan” atau “pekerjaan utama”. Dari kondisi ini dapat dilihat perbedaan pandangan yang didasari pada budaya yang mengakar di suatu negara dengan dunia internasional yang menganggapnya ini adalah permasalahan yang sangat serius.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussalam. (2006). *Hukum pidana internasional*. Jakarta: Restu Agung.
- Acharya, A. (2014). *Constructing global order: Agency and change in world politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ananta, N. I. (2023). Kebijakan UN Trafficking in Person Protocol dalam kasus human trafficking di Thailand, seberapa efektif kebijakan ini? *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/i25819/656c6871f6936f2272336602/kebijakan-un-trafficking-in-person-protocol-dalam-kasus-human-trafficking-di-thailand-seberapa-efektif-kebijakan-ini>
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-dasar hubungan internasional*. Jakarta: Kencana.
- Brahmaputra, D. A. (2020). Perspektif konstruktivisme terhadap isu perdagangan manusia di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 112–128.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Darmayanti, K. N., & dkk. (2022). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) sebagai transnational crime. *Ganesha Law Review*, 3(1), 33–42.
- Jackson, R., & Sørensen, G. (2013). *Introduction to international relations: Theories and approaches* (5th ed.). New York: Oxford University Press.
- Nuraeny, H. (2016). *Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurul, I., & dkk. (2023). Upaya Thailand dalam mengatasi prostitusi sebagai tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) melalui kerja sama internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 3(2), 88–97.
- Syamsudin. (2020). Bentuk-bentuk perdagangan manusia dan masalah psikososial. *Sosio Informa*, 6(1), 16–35.
- Tanu, D. (2018). *Growing up in transit: The politics of belonging at an international school*. New York: Berghahn Books.
- Wibisono, Y. (2021). Human trafficking sebagai isu keamanan non-tradisional dalam hubungan internasional. *Jurnal Keamanan Global*, 7(1), 1–13.
- Wijayanti, R., & Putra, H. S. (2022). Dinamika kerja sama regional ASEAN dalam penanganan perdagangan manusia lintas negara. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(1), 45–58.
- Yulianto, E. (2019). Konstruktivisme dalam studi hubungan internasional: Teori dan aplikasi. *Jurnal Politik Internasional*, 1(1), 75–90.